

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, Teori Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>1</sup>

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanah bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten karawang. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada masalah di sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kebijakan yang tidak baik akan menghasilkan kinerja yang baik apabila sistem dan proses pelaksanaanya tidak baik. Seperti terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun di daerah dan

---

<sup>1</sup> Permendagri No 13 Tahun 2006

kesemuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang berperan dalam sistem dan proses kebijakan.<sup>2</sup>

Penelitian ini juga sejalan dengan Dina Afrina, menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ada keterkaitan antara sistem akuntansi pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya suatu rangkaian prosedur yang tersistematis dalam rangka mempertanggungjawabkan APBD nya maka akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja atas kegiatan yang telah tersusun didalam perencanaan strategis suatu instansi.<sup>3</sup>

#### **B. Pengaruh Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Menurut teori *The Commitee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Threadway Commission* adalah “*A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectievenes and efficiency of operations (2) the reability of financial*

---

<sup>2</sup>Fitriyanah, Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja Pemerintah Daerah, (Universitas Komputer Indonesia), hal.9-10

<sup>3</sup> Dina Afrina, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ( Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015), hal.7

*reporting and (3) the compliance of applicable laws and regulations.*

Dimana mengandung arti pengendalian internal dirancang oleh manajemen dan dilakukan oleh personel disemua tingkatan organisasi, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas proses operasi, keandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrawati,<sup>5</sup> Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitiannya Sistem Pengendalian intern memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida Ayu Made Dwiki Paramitha<sup>6</sup>, bahwa sistem pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Banyak proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi interaksi informal antara seorang manajer dengan manajer lain atau manajer dan bawahannya. Interaksi informal ini menjadi bagian dalam suatu sistem perencanaan dan pengendalian formal.

---

<sup>4</sup> Theodorus M.Tuanakotta,*Audit Kontemporer*,(Jakarta:Salemba Empat,2017), hal.94

<sup>5</sup> Fitrawati, Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017), hal 177-184

<sup>6</sup> Ida Ayu Made Dwiki Paramitha,*Pengaruh Keteapatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja*,(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya, Vol.16.3 Tahun 2016), hal.2479

### **C. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berpengaruh negatif atau tidak terdapat pengaruh adanya kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten tulungagung.

Menurut Mardiasmo, teori anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.<sup>7</sup>

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh, Dewi Aprilianti bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini juga mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan Rio Pratama bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV.ANDI offset, 2018), hal. 78

<sup>8</sup> Dewi Aprilianti, dkk, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 9, No. 2, Juli 2020), hal. 185

<sup>9</sup> Rio Pratama, dkk, *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah*. (Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019), hal. 441

instansi pemerintah tidak bergantung kepada kejelasan sasaran yang telah dibuat bagian perencanaan anggaran. Sehingga dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, tidak dapat mempermudah instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Netty Herawatty, yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki peranan penting dalam menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan hasil ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Tulungagung keberadaan kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan nilai kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kerja. Namun di pandang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan menyerahkan AKIP kepada yang membidangi dan kurangnya keterlibatan langsung dalam proses akuntabilitas kinerja. Anggaran yang jelas dapat dimengerti dan harus disusun dengan baik sehingga pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat dicapai dengan baik.

---

<sup>10</sup> Netty Herawaty, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, (Volume 13 No 2, 2011), hal.31-36

**D. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji simultan (uji f) hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran secara serentak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran diterapkan dalam BPKAD Kabupaten Tulungagung, maka akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian Mei Anjarwati<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan secara simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

---

<sup>11</sup> Mei Anjarwati, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*, (Accounting Analysis Journal 1 (2) (2012), hal.9